BAB V

KESIMPULAN

Hipotesa mengenai Peran PBB sebagai organisasi internasional ternyata terbukti dengan bantuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh PBB di Palestina.. Sejarah panjang konflik Israel Palestina yang telah terjadi selama berabad-abad mengakibatkan banyak kerugian bagi warga Palestina, seperti hilangnya tenpat tinggal, keluarga bahkan hak asasi manusia. Israel yang ingin mengusir Palestina dari tanah mereka sendiri dengan alasan bahwa tanah yang ditempati oleh Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Yahudi sehingga Israel merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dan melakukan pengusiran secara paksa kepada warga Palestina.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel selama tahun 2010-2011 seperti pemukiman liar Israel di Palestina, penghancuran sarana pendidikan, penyerangan di Tepi Barat, penyerangan di jalur Gaza, penyerangan dengan senjata terlarang dan penyerangan terhadap kapal bantuan mavi marmara yang mana kapal tersebut berisi relawan dan bantuan yang akan di kirim ke Palestina. Namun sebelum bantuan disalurkan, Israel menghadang kapal dengan tembakan membabi buta dan memperlakukan para relawan dengan semena-mena sedangkan para relawan tidak membawa senjata. Tindakan Israel tersebut tentu mendapat kecaman dari dunia internasional, berbagai cara dilakukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel. Sesuai dengan hipotesa yang diambil oleh penulis yang berangkat dari

pernyataan oleh Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok yaitu diantaranya organisasi internasional dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peranan yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia warga Palestina yaitu memberikan bantuan operasioal melalui bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina yang di tindas oleh Israel dan juga bantuan yang bersifat normative yaitu melalui resolusi-resolusi ataupun sanksi yang diberikan kepada Israel.

Perserikatan Bangsa-bangsa merupakan organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia dan merupakan organisasi tertinggi di dunia dihadapkan oleh masalah yang diakibatkan oleh konflik yang di lakukan Israel dan Palestina yaitu masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina. Perserikatan Bangsa-bangsa sesuai dengan piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul pernyataan di dunia tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia ini sangat menjunjung tinggi isi dari kesepakatan bersama tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu lembaga yang menangani masalah Hak Asasi Manusia yaitu komisi HAM yang sekarang berganti nama menjadi Dewan HAM PBB. Sesuai standar HAM PBB, semua negara harus menghormati Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disepakati secara bersama ini.

Standar HAM dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional, proses pembentukan standar PBB dilakukan oleh negara-negara dalam forum internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam sistem PBB, setiap perwakilan dari anggota PBB

diundang untuk melakukan persiapan dan negosiasi terkait dengan pembentukan standar HAM internasional. Hal ini dilakukan agar semua pandangan dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat diakomodasi dalam rancangan perjanjian atau deklarasi. Dalam membahas racangan tersebut dilakukan penelitian yang mendalam dan perdebatan yang panjang sampai disepakati teks akhir dari perjanjian dan deklarasi. Walaupun pada akhirnya seperti dalam perjanjian internasional masih dibutuhkan tindakan lebih lanjut dari negara-negara untuk menandatangani, mesahkan atau mengsksesi dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional dari perjanjian tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel dengan berbagai cara ini untuk menindas warga Palestina yang mereka akui sebagai tanah mereka. Serangan, kecaman dan sanksi dari PBB pun belum dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi di Palestina. Pelanggaran yang dilakukan ini telah melanggar hak EKOSOB yang mana hak tersebut adalah menitik beratkan setiap manusia memiliki hak atas kecukupan pangan, hak atas pemukiman, hak atas terbebas dari kelaparan, dan hak atas kesehatan.

Negara Palestina sebagaimana kita ketahui telah menjadi negara yang berdaulat setelah dideklarasikan pada tahun 1948 dan telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia internasional. Bahkan sebelum itu, wilayah Palestina sebagaimana Resolusi No. 181 Majelis Umum PBB *(UN Partition Plan),* 45% wilayah Palestina telah menjadi wilayah bangsa Arab, sedangkan sisanya menjadi wilayah Israel. Dalam konteks ini sangat jelas otoritas kewilayahan dari negara Palestina. Pendudukan atas wilayah Palestina dengan

penggunaan senjata jelas bertentangan dengan hukum humaniter, tindakan pedudukan negara Israel terhadap Palestina dikatagorikan sebagai pendudukan asing.

Konflik yang berkelanjutan ini seperti tidak ada penyelesaian yang berarti dari PBB sebagai organisasi internasional yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang mana dengan penyerangan-penyerangan yang di lakukan oleh Israel ini mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia dari para warga Palestina yang menginginkan hidup layak dan menginginkan kehidupan yang tentraam dan nyaman. Diantara penyerangan-penyerangan ini pada tahun 2010-2011 banyak sekali penyerangan yang merugikan seperti penyerangan terhadap kapal bantuan Mavi Marmara yang membawa bantuan relawan kemanusiaan beserta bantuan pangan.

Penyerangan ini sangat merugikan dan menjadi perhatian masyarakat internasional terlebih lagi dari PBB sebagai organisasi internasional. Serangan terhadap kapal bantuan Mavi Marmara oleh Israel sama halnya dengan Israel yang mengambil hak warga Paelstina untuk mendapatkan kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan. Karena seperti yang kita ketahui pendudukan Palestina sangat mengandalkan bantuan dari luar untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Dari hal ini terlihat jelas bahwa Israel telah melanggar hak asasi manusia dalam bidang ekosob. Karena menurut konvenan ekonomi sosial dan budaya yang mulai berlaku pada 3 Januari 1976, setiap manusia memiliki hak atas kecukupan pangan, hak atas pemukiman, hak atas terbebas dari kelaparan.

Selain itu pelanggaran Israel adalah pemukiman liar di Palestina yang mana Israel menggusur warga Palestina dan membangun pemukiman-pemukiman Yahudi. Penggusuran yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di daerah Yerusalem telah menyebabkan warga Pelestina kehilangan tempat tinggalnya, hal ini jelas telah melanggar HAM ekosob dimana dalam pasal 11 ayat 1 menytakan bahwa setiap warga negara berhak atas pemukiman. Pengahancuran saran pendidikan dan serangan Israel di tepi barat merupakan pelanggaran Israel yang membuat hak-hak asasi manusia warga Palestina hilang karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena sekolah-sekolah mereka hancur karena serangan-serangan yang di lakukan Israel dan juga serangan di tepi barat ini telah menghancurkan masjid, padahal seperti yang kita ketahui penghancuran masjid merupakan melanggar hukum humaniter karena setiap pihak dilarang keras untuk menyerang sarana-sarana ibadah termasuk masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam.

Dengan melihat banyaknya korban yang diakibatkan oleh serangan Israel dan banyaknya infrakstruktur yang rusak akibat serangan tersebut, PBB selaku organisasi internasional yang memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dunia merasa perlu untuk turut andil dalam membantu warga palestina dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Bantuan-bantuan yang di lakukan PBB adalah bentuk nyata untuk melindungi hak asasi warga Palestina dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Hipotisis penelitian saya mengenai PBB sebagai organisasi internasional dapat memberikan bantuan opeasional melaui bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina yang di tindas Israel dan juga PBB dapat melakukan peranannya dalam memberikan bantuan normatif melalui resolusi terbukti. Tren positif yang dilakukan PBB sebagai organisasi internasional melalui badan-badan khusus nya yang melakukan berbagai bantuan yang berharap untuk kedepannya dapat membantu hak asasi warga Palestina dalam kehidupan yang lebih baik. Bantuan-bantuan yang di lakukan adalah oleh UNRWA (United Nation relief and Works Agency) dan UNDP (United Nation Development Programe).

Melalui badan khusus UNRWA, bantuan-bantuan dapat secara langsung disalurkan karena mengingat sangat susahnya bantuan untuk masuk kewilayah Palestina dikarenakan blockade-blokade yang di lakukan Israel. Bantuan ini seperti bantuan dari bidang pendidikan, UNRWA memperbaiki bangunan-bangunan sekolah yang telah hancur yang berjumlah 243 sekolah dengan jumlah murid 219.000 orang. Dan juga melalui UNRWA bantuan dari berbagai Negara bisa disalurkan seperti bantuan dari Republik Korea dengan dana yang dikeluarkan sebesar 400.000 dolar Amerika untuk pengadaan komputer. Selain itu bantuan yang di berikan kepada warga Palestina adalah dalam bidang kesehatan dengan membangun 20 pusat kesehatan di Jalur Gaza dan 5 tim kesehatan yang bergerak diwilayah Tepi Barat yang terdiri dari petugas medis, perawat, petugas laboratorium, petugas farmasi. Tim kesehatan yang bentuk oleh UNRWA ini dapat mengakomodir 13.000 pasien perbulannya. Bantuan melalui badan khusus PBB ini telah banyak membantu para warga Palestina yang telah kehilangan

tempat tinggal mereka dengan UNRWA membangun tempat-tempat tinggal untuk para pengungsi Palestina yang mana tempat tinggal mereka telah hancur oleh serangan yang di lakukan Israel. Bantuan untuk pengungsi ini di wujudkan UNRWA yang bekerjasama dengan Uni Eropa yang membantu para pengungsi yang ada di Lebanon sebesar 12 juta Euro.

Bantuan yang di berikan oleh UNRWA ini untuk membantu meringankan warga Palestina terlebih lagi para pengungsi Palestina yang kehilangan tempat tinggal mereka yang mengharuskan mereka berpindah tempat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan bantuan yang di salurkan melalui UNRWA ini dapat melindungi hak asasi warga Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang semestinya tanpa kehilangan hak-hak yang mendasar.

Bantuan yang di berikan PBB sebagai oragnisasi iternasional lainnya adalah melaui badan khusus PBB yaitu UNDP (United Nation Development Programe). Bantuan melalui badan ini untuk pembangunan di Palestina karena hancurnya dikarenakan serangan yang di lakukan Israel. Bantuan ini untuk peningkatan kemampuan warga Palestina, pada maret 2010 UNDP meluncurkan proyek bagi lulusan universitas di Gaza untuk dapat bekerja. Proyek ini di danai oleh pemerintah Jepang dengan nilai proyek sebesar $756.276 proyek ini menargetkan 230 sarjana universitas di Gaza untuk dapat bergabung dalam pelatihan-pelatihan profesional seperti pelatihan bahasa Inggris, Manajemen, dan keuangan, yang nantinya akan disalurkan pada lembaga-lembaga yang berlokasi di Gaza. Selain itu UNDP mempunyai program untuk penyembuhan penyakit Tuberkulosis dengan bekerjasama dengan badan PBB lainnya yaitu WHO karena

mengingat banyaknya warga Palestina yang mengidap penyakit ini dengan melakukan penyembuhan-penyembuhan dengan alat-alat modern kesehatan. Bantuan yang terkahir yang dilakukan UNDP adalah bantuan dalam ranah hokum dengan meningkatkan kehidupan warga Palestina dengan proses perbaikan administrasi dengan prinsip-prinsip yang ada pada hak asasi manusia.

Bantuan kemanusiaan yang diberikan ini membuktikan adanya peran serta PBB melalui badan khususnya UNRWA dan UNDP untuk melindungi warga Palestina. Bantuan ini bisa di manfaatkan sedemikian rupa oleh pemerintah Palestina untuk melindungin warganya. Dengan bantuan ini juga pemerintah Palesttina bisa mensosialisasikan kepada warganya untuk terus berusaha tanpa putus asa dengan keterampilan-keterampilan maupun keahlian yang mereka dapat melalui pendidikan maupun kesehatan yang mereka dpat dari bantuan-bantuan yang di berikan amau yang di salurkan melalui UNRWA dan UNDP.

Bantuan yang di berikan untuk warga Palestina mengalir melalui badan-badan khusus PBB. Selain bantuan PBB yang menyangkut pendidikan, kesehatan untuk para pengungsi Palestina, PBB memberikan bantuan melalui kegiatan-kegiatan Normatif yang mana bantuan ini berupa resolusi-resolusi maupun sanksi yang diberikan kepada Israel. Pada tahun 2010-2011, PBB sebagai organisasi yang universal mengeluarkan beberapa resolusi kepada Israel dengan tujuan untuk menghentikan serangan yang di lakukan oleh Israel kepada warga Palestina karena dengan serangan yang di lakukan itu telah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. meskipun demikian tak semua resolusi yang diajukan berhasil disetujui oleh semua negara anggotanya. Banyak dari resolusi ataupun sanksi

yang diajukan gagal atau tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya camput tangan dari Amerika Serikat sebagai sekutu abadi Israel dengan selalu menggunakan hak vetonya apabila resolusi yang akan dijatuhkan terlalu keras bagi Israel. Meskipun demikian ada juga resolusi yang berhasil lolos diberikan kepada Israel walaupun implementasi dari resolusi tersebut tidak membuahkan hasil yang signifkan.

Resolusi-resolusi ini memberikan angina segar kepada Palestina walaupun masih saja terjadi penyerangan-penyerangan. Resolusi di Yerusalem Timur menuntut agar Israel segera menghentikan kekerasan yang dilakukannya kepada warga Palestina dan mematuhi konvensi jenewa IV 1949 yang menggaris bawahi perlakuan terhadap penduduk sipil ketika konflik berlangsung. Hal ini di lakukan karena masih banyaknya warga sipil yang mengalami kekerasan maupun tidak mendapatkan hak nya. PBB juga mengeluarkan resolusi melalui Deawan HAM PBB yaitu dengan mendesak Israel untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Gaza. Mengingat banyaknya serangan yang di lakukan Israel terhadap Palestina.

Resolusi yang di berikan PBB yang di sepakati oleh seluruh anggota Dewan HAM ini mengartikan bahwa peran serta PBB sangat di buthkan oleh warga Palestina. Yaitu rsolusi yang di keluarkan untuk pelanggaran yang di lakukan Israel terhadap penyerangan kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara. Penyerangan ini memakan banyak korban karena penyerangan di lakukan dengan semena-mena menggunakan senjata api sedangkan para relawan yang ada di atas kapal tidak mempounyai senjata apapun dan hanya menggunakan peralatan yang

ada di sekitarnya untuk membela diri. Adapun resolusi ini menyatakan bahwa Dewan HAM mengutuk sekeras-kerasnya penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada kapal bantuan kemanusiaan tersebut, memutuskan untuk mengirimkan Independent International Fact- Finding Mission/IIFFM untuk menyelidiki pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum HAM dalam penyerangan Israel atas kapal yang membawa bantuan kemanusiaan, dan meminta Israel untuk sesegera mungkin mengakhiri penguasaan atas wilayah Gaza dan wilayah okupasi lainnya.

Konflik yang bekerpanjangan antara Israel dan Palestina yang mana Israel mengaku bahwa mereka berhak memiliki tanah di palestina ini melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan seperti pembuatan rumah-rumah untuk warga Yahudi dengan menggusur pemukim warga Palestina. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan tempat tinggal warga dan di lakukan secara illegal. Dengan adanya pemukiman liar Israel di Palestina ini PBB mengeluarkan resolusi yang mana resolusi tersebut di tentang oleh Amerika Serikat dengan menggunakan hak vetonya. Padahal PBB melalui resolusi tersebut menyatakan bahwa pemukiman Israel adalah illegal dan tidak akan di akui sebagai komunitas internasional.

Harapan-harapan akan terciptanya perdamaian yang abadi terjadi di Palestina dengan tetap mengedepankan hak asasi warga Palestina tersebut. Dengan bantuan-bantuan yang di berikan ini panulis myatakan bahwa terdapat peran serta PBB sebagai oragnisasi internasional dalam mendukung keamanan dan perdamaian di Palestina.

Penulis menyadari betul bahwa tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Meskipun demikian, penulis berharap jika tulisan ini dapat membantu untuk kegiatan belajar mengajar di jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta diadakannya penelitian lanjutan yang terkait dengan masalah perdamaian dan kemerdekaan bangsa Palestina, sehingga dapat menambah pengetahuan dari para mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional kedepannya.